

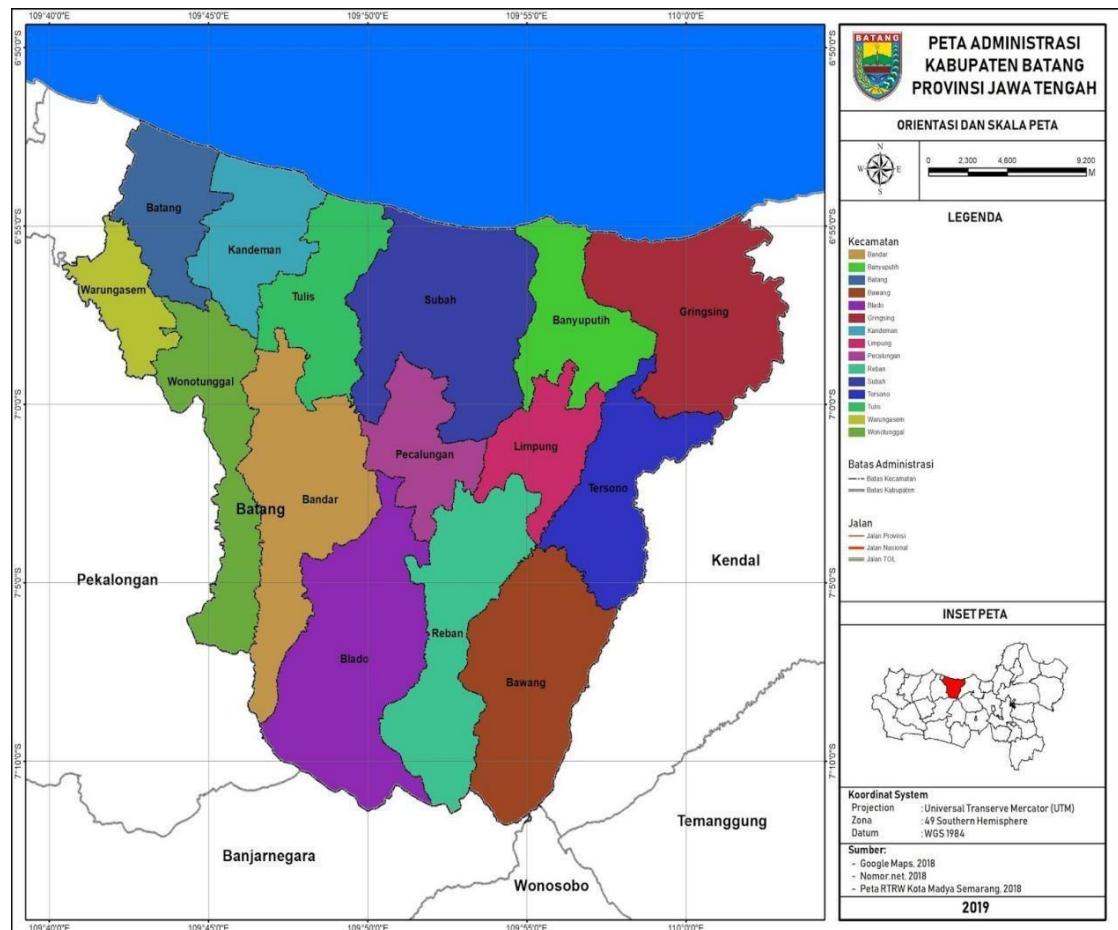
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Batang

**Gambar 2.1
Peta Kabupaten Batang**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, 2024

Menurut sejarah, Batang telah memiliki dua kali periode pemerintahan Kabupaten. Periode I diawali zaman kebangkitan kerajaan Mataram Islam (II) sampai penjajahan asing, kira-kira dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember 1935. Sedang periode II, dimulai awal kebangkitan Orde Baru (8 April 1966) sampai sekarang, bahkan Batang dapat ditelusuri sejak pra-sejarah. Sejak dihapuskan status Kabupaten (1 Januari 1936) sampai tanggal 8 April 1966, Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan.

Tahun 1946, mulai ada gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang. Ide pertama lahir dari Pak Mohari yang disalurkan melalui sidang KNI Daerah dibawah pimpinan H.Ridwan alm. Sidang bertempat di gedung bekas rumah Contrder Belanda (Komres Kepolisian 922).

Tahun 1952, terbentuk sebuah Panitia yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Batang. Panitia ini dinamakan Panitia Pengembalian Kabupaten Batang, yang bertugas menjalankan amanat masyarakat Batang. Dalam kepanitiaan ini duduk dari kalangan badan legislatif serta pemuka masyarakat yang berpengaruh saat itu. Susunan panitianya terdiri atas RM Mandojo Dewono (Direktur SGB Batang) sebagai Ketua, R. Abutalkah dan R. Soedijono (anggota DPRDS Kabupaten Pekalongan) sebagai Wakil Ketua. Panitia juga dilengkapi dengan dua anggota yaitu R. Soenarjo (anggota DPRDS yang juga Kepala Desa Kauman) dan Rachmat (anggota DPRDS).

Tahun 1953, Panitia menyampaikan Surat Permohonan terbentuknya kembali status Kabupaten Batang lengkap satu berkas, yang langsung diterima oleh Presiden Soekarno pada saat mengadakan peninjauan daerah dan menuju ke Semarang dengan jawaban akan diperhatikan.

Tahun 1955, Panitia mengutus delegasi ke pemerintah pusat, yang terdiri atas RM Mandojo Dewono, R.Abutalkah, dan Sutarto (dari DPRDS).

Tahun 1957, dikirim dua delegasi lagi. Delegasi I, terdiri atas M. Anwar Nasution (wakil ketua DPRDS), R.Abutalkah, dan Rachmat (Ketua DPRD Peralihan). Sedangkan delegasi II dipercayakan kepada Rachmat (Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan), R.Abutalkah, serta M.Anwar Nasution.

Tahun 1962, mengirimkan utusan sekali. Utusan tersebut dipercayakan kepada M. Soenarjo (anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan juga Wedana Batang) sebagai ketua, sebagai pelapor ditetapkan Soedibjo (anggota DPRD), serta dibantu oleh anggota yaitu H. Abdullah Maksoem dan R. Abutalkah.

Tahun 1964, dikirim empat delegasi. Delegasi I, ketuanya dipercayakan R. Abutalkah, sedang pelapor adalah Achmad Rochaby (anggota DPRD). Delegasi ini dilengkapi lima orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu Rachmat, R. Moechjidi, Ratam Moehardjo, Soedibjo, dan M. Soenarjo.

Delegasi II, susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I tersebut, sebelum menyampaikan tuntutan rakyat Batang seperti pada delegasi-delegasi terdahulu, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta diawali penyampaian tuntutan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Delegasi III, yang juga susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I dan II kembali mengambil langkah menyampaikan tuntutan rakyat Batang langsung kepada Mendagri. Sedang

Delegasi IV mengalami perubahan susunan keanggotaan. Dalam delegasi ini sebagai ketua R. Abutalkah, sebagai wakil ketua Rachmat, sedangkan sebagai pelapor adalah Ratam Moehardjo, Ahmad Rochaby sebagai sekretaris I, R. Moechjidi sebagai sekretaris II serta dilengkapi anggota yaitu Soedibjo dan M. Soenarjo.

Tahun 1965, diutus delegasi terakhir. Sebagai ketua R. Abutalkah, wakil ketua Rachmat, sekretaris I Achmad Rochaby, sekretaris II R. Moechjidi, pelapor Ratam Moehardjo serta dilengkapi dua orang anggota yaitu M. Soenarjo dan Soedibjo. Delegasi terakhir atau kesepuluh itu, memperoleh kesempatan untuk menyaksikan sidang paripurna DPR GR dalam acara persetujuan dewan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang menjadi Undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965. Tanggal 8 April 1966, bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi masyarakat tradisional Batang, dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang lama (rumah dinas yang sekaligus kantor para Bupati Batang lama) dilaksanakan peresmian pembentukan Daerah Tingkat II Batang.

Upacara yang berlangsung khidmat dari jam 08.00 s/d 11.00 itu, ditandai antara lain dengan Pernyataan Pembentukan Kabupaten Batang oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Brigjend (Tit) KKO-AL Mochtar, pelantikan R. Sadi Poerwopranoto sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Batang, serah terima wewenang wilayah dari Bupati KDH Pekalongan kepada Pejabat Bupati KDH Batang, serta sambutan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Batang

Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46'' sampai 7° 11' 47'' Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19'' sampai 110° 03' 06'' Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Kendal
Sebelah Selatan	: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Barat	: Kota dan Kabupaten Pekalongan ¹ .

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang. 2024. Kabupaten Batang Dalam Angka.

Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Penulis juga ingin menampilkan data-data yang dihimpun dari BPS Kabupaten Batang tentang luas wilayah Kabupaten Batang yang dapat disampaikan penulis pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Batang

Kecamatan	Penduduk	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Wonotunggal	39.930	4,82	763	101,22
Bandar	74.070	8,94	1.010	102,83
Blado	46.808	5,65	597	103,72
Reban	41.726	5,03	900	100,12
Bawang	57.006	6,88	772	104,23
Tersono	41.881	5,05	849	101,27
Gringsing	65.040	7,85	894	100,41
Limpung	45.368	5,47	1.358	99,77
Banyuputih	37.803	4,56	851	101,47
Subah	54.435	6,57	652	101,19
Pecalungan	33.188	4,00	917	101,35
Tulis	40.357	4,87	895	99,08
Kandeman	57.444	6,93	1.376	102,79
Batang	138.026	16,65	4.018	101,10
Wonotunggal	55.801	6,73	2.369	103,19
Jumlah Total	828.883	100,00	1.051	101,89

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2024

Adapun jarak antara kota jika dihitung dari Kabupaten Batang dengan kota- kota lain, yang

meliputi: Pekalongan : 9 Km Jakarta : 392 Km Pemalang : 43 Km Kendal : 64 Km Tegal : 72 Km Semarang : 93 Km Brebes : 85 Km Surabaya : 480 Km Cirebon : 144 Km.

Kabupaten Batang terletak di Provinsi Jawa Tengah, terbagi menjadi 15 kecamatan dengan luas wilayah 78.864,16 Ha. Dari luas total tersebut 64.337,90 Ha (81,58%) lahan pertanian dan 14.526,26 Ha (18,42) lahan non pertanian. Dari lahan pertanian tersebut terdapat 19.012,80 Ha berupa lahan sawah dan 45.325,10 Ha berupa lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah terdiri dari tegal/kebun (51,58%), perkebunan (15,30%), hutan negara (26,87%), dan lainnya (6,25%). Kabupaten Batang memiliki topografi pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada 5 pegunungan dengan ketinggian rata rata di atas 2.000 meter.²

3. Kondisi Penduduk Kabupaten Batang

Penulis menyampaikan data-data terkait jumlah penduduk Kabupaten Batang yang dihimpun dari BPS Kabupaten Batang dari 15 kecamatan yang ada, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Presentase		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Wonotunggal	20.086	19.844	66.009	2.42	2.39	4.82
Bandar	37.552	36.518	64.665	4.53	4.41	8.94
Blado	23.831	22.977	61.779	2.88	2.77	5.65
Reban	20.875	20.851	60.126	2.52	2.52	5.03
Bawang	29.093	27.913	62.473	3.51	3.37	6.88
Tersono	21.073	20.808	65.774	2.54	2.51	5.05
Gringsing	32.586	32.454	69.108	3.93	3.92	7.85
Limpung	22.658	22.710	66.305	2.73	2.74	5.47
Banyuputih	19.039	18.764	59.707	2.30	2.26	4.56
Subah	27.378	27.057	55.789	3.30	3.26	6.57
Pecalungan	16.705	16.483	51.863	2.02	1.99	4.00
Tulis	20.085	20.272	46.560	2.42	2.45	4.87
Kandeman	29.117	28.327	37.832	3.51	3.42	6.93
Batang	63.391	68.635	27.835	8.37	8.28	16.65
Warungasem	28.339	27.462	18.705	3.42	3.31	6.73
Jumlah Total	417.808	411.075	828.883	50,41	49,59	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2024

² Ibid, Hlm. 5

Penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2023 mencapai 828.883 jiwa dengan komposisi 417.808 jiwa penduduk laki-laki dan 411.075 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2023 sebesar 1,44 %. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tahun 2023 mencapai 1.051 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang dengan kepadatan sejumlah 4.018 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Blado sejumlah 597 jiwa/km².

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Batang Menurut Kecamatan

Wilayah	2020	2021	2022	2023
Wonotunggal	18.725	19.062	19.454	19.844
Bandar	35.280	35.633	36.081	36.518
Blado	22.464	22.599	22.792	22.977
Reban	20.077	20.300	20.578	20.851
Bawang	27.246	27.424	27.673	27.913
Tersono	20.59	20.274	20.544	20.808
Gringsing	31.281	31.619	32.042	32.454
Limpung	21.895	22.129	22.423	22.710
Banyuputih	18.358	18.358	18.564	18.764
Subah	26.444	26.606	26.837	27.057
Pecalungan	16.168	16.247	16.368	16.483
Tulis	19.420	19.670	19.973	20.272
Kandeman	26.959	27.365	27.848	28.327
IBatang	66.394	67.030	67.846	68.635
Warungasem	26.300	26.641	27.054	27.462
Jumlah Total	396.911	400.957	406.077	411.075

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2024

Penduduk perempuan di Kabupaten Batang setiap tahunnya mengalami penambahan. Dari tahun 2020 berjumlah 396.911 jiwa. Tahun 2021 berjumlah 400.957 jiwa. Tahun 2022 berjumlah 406.077 jiwa. Terakhir pada tahun 2023 berjumlah 411.075 jiwa.

2.2 Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang

Belakangan ini muncul permasalahan sosial yang diakibatkan oleh besarnya jumlah sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Mengenai permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, Kabupaten Batang menjadi salah satu kabupaten yang disorot oleh media karena terjadi kasus pelecehan seksual pada anak-anak secara hampir berantai pada 2023. Salah satu kasus yang paling mengejutkan yaitu pelecehan seksual yang

dilakukan oleh seorang kiai salah satu pondok pesantren di Kabupaten Batang yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap para santrinya dengan jumlah korban yang lumayan banyak. Berawal dari kasus tersebut, akhirnya banyak media yang memberitakan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Batang. Bahkan dari kementerian sosial, Gubernur Jawa Tengah serta Sentra Terpadu Kartini di Temanggung juga ikut hadir dalam rangka memberikan motivasi dan bantuan kepada belasan korban. Berawal dari kasus tersebut, akhirnya Kabupaten Batang meningkatkan pelaksanaan penanganan kekerasan seksual dengan cara melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait seperti pemerintah, lembaga hukum, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Utariyah Budiastuti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPPA):

“Kasus kekerasan seksual di Batang sendiri mulai *booming* sekitar akhir 2021 mbak, terus tahun berikutnya sama ada kasus yang *booming* lagi itu 2022, kemudian 2023 semakin meningkat lagi”

Berdasarkan data DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022-2023 sebagai berikut:

Tabel Grafik 2.1
Jumlah Data Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Batang Tahun 2022-2023



Sumber: DP3AP2KB

Berdasarkan data DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022-2023 menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Jika dilihat dari data di atas, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Batang meningkat berkali-kali lipat dalam satu tahun, jumlah korban mencapai 67 anak. Pada tahun 2022, terdapat 14 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah bertambah menjadi 53 korban anak, yakni 27 laki-laki dan 26 perempuan. Menurut penyampaian Bu Utariyah:

“Terkait data spesifik seperti data kekerasan kita DP3AP2KB enggak punya mbak, yang punya malah di Polres, soalnya korban ada yg langsung lapor ke Polres. Kita Cuma punya catatan tahun 2022 ada 14 kasus, 2023 ada peningkatan menjadi 26 kasus pemerkosaan dan 27 kasus pencabulan.

Kayaknya masih ada yang lain mbak, tapi pada gak berani lapor ke P2TP2A ataupun ke polres”

Selain itu, Bu Utariyah Budiastuti juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang banyak berbentuk non verbal.

“Sebenarnya kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang itu lebih ke non verbal mbak. Biasanya anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berupa pemerkosaan, nah ini awalnya kan mereka dipaksa mbak dengan cara diancam atau bisa diiming-imingi sesuatu mbak”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual non verbal banyak terjadi di Kabupaten Batang, yaitu:

1. Pemerkosaan

Kasus pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Batang banyak dialami oleh anak dengan rentang usia 13-16 tahun, yang mana pelaku dalam melakukan aksinya memilih tempat sepi dan tertutup. Pelaku menggunakan iming-iming dalam merayu korban seperti uang, makanan ataupun biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bu Utariyah:

“Ada mbak kasus yang terjadi di pondook pesantren. Jadi pelaku ini melakukan aksinya di lingkungan pesantren kayak di kantin, tempat jemuran, teras rumahnya, dan kamar santri putri. Kalau keterangan dari korban, biasa pelaku ini memilih waktu dini hari mbak pas orang-orang pada tidur. Biasanya pelaku nanti bangunin korbannya, terus ngajak ke tempat yang sepi. Pelaku ini memberikan uang, makanan, sama biaya sekolah buat korban untuk tutup mulut mbak. Padahal pelaku ini pengasuh pesantrene itu tapi melakukan hal seperti itu”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan posisi pelaku sebagai pengasuh pondok pesantren ini menjadi alasan korban takut untuk melawan. Kasus pemerkosaan ini sangat ramai diperbincangkan karena jumlah korban yang terbilang banyak yaitu sekitar 19 kasus yang telah melapor atau yang berani melapor. Kemungkinan masih ada korban lain yang takut untuk lapor ke polres ataupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun ke pihak yang berwajib lainnya.

2. Pencabulan

Bentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang selanjutnya berupa pencabulan, di mana pencabulan ini dilakukan oleh 1 pelaku yang memiliki banyak korban. Hal ini disampaikan oleh Bu Utariyah:

“Kalau kasus kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan ini pelakunya

guru mengaji sekaligus merangkap pelatih rebana mbak. Korbannya ada 22 anak laki-laki dengan rentang usia 5-13 tahun. Biasanya pelaku ngajak korban jalan-jalan atau meminjamkan ponselnya dulu, selain itu juga mengiming-imingi para korban dengan jajanan dan uang mba.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, hal tersebut telah disampaikan oleh Bu Utariyah Budiastuti selaku ketua BPPPA:

“Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja mbak, baik di tempat yang ramai maupun tempat yang sepi. Bisa di rumah, di sekolah, di rumah teman, di rumah tetangga, di bus, di mall, di pantai di toilet umum, dan tempat lainnya. Tapi, biasanya kekerasan seksual ini terjadi di tempat tertutup dan sepi.”

Dengan adanya kekerasan seksual pada anak ini memiliki dampak yang cukup memprihatinkan. Hal ini disampaikan oleh Bu Ratmi selaku ibu dari salah satu korban kekerasan seksual:

“Nek tak lihat anak jadi trauma mba, sama takut kalau ada orang asing. Malahan ada mbak korban lain yang sampe nggak mau berteman dengan laki-laki, jadi bertemannya dengan perempuan saja mbak. Anak juga sempat ngalami mimpi buruk mbak.”

Terkait faktor terjadinya kekerasan seksual disampaikan oleh Ibu Utariyah:

“Kekerasan seksual bisa terjadi pada anak itu sebenarnya diakibatkan oleh kurangnya orangtua dalam memahami anak mengenai amalan ajaran agama, misalnya dalam Islam pentingnya menjaga akhlak, menghormati hak orang lain, dan memelihara kesucian gitu ya mba. Tapi nggak semua diakibatkan oleh faktor tersebut, karena ada juga kan itu kasus yang di pondok pesantren. Terus ada juga ya mungkin gara-gara cara berpakaianya gitu mba.”

2.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang

2.3.1 Letak Geografis DP3AP2KB Kabupaten Batang

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 58 Batang 51215 Jawa Tengah.³

³ Profil DP3AP2KB Kabupaten Batang, <https://dp3ap2kb.batangkab.go.id/?p=1&id=2> di akses

2.3.2 Profil DP3AP2KB Kabupaten Batang

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang dibentuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Batang No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Struktur organisasi DP3AP2KB adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sekretaris
 - b. Subbagian program
 - c. Subbagian keuangan
3. Subbagian umum dan kepegawaian
 - a. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, membawakan;
 - 1) Seksi pengendalian penduduk
 - 2) Seksi penyuluhan dan penggerakan
 - b. Bidang keluarga berencana, membawakan;
 - 1) Seksi pembinaan dan pelayanan keluarga berencana
 - 2) Seksi sarana prasarana keluarga berencana
 - c. Bidang ketahanan dan kesejahteraan, membawakan;
 - 1) Seksi pembinaan ketahanan keluarga
 - 2) Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - d. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawakan;
 - 1) Seksi pemberdayaan perempuan
 - 2) Seksi perlindungan anak
 - e. Unit pelaksana teknis badan.

2.3.3 Tujuan Pokok, Fungsi, Visi dan Misi DP3AP2KB Kabupaten Batang

Adapun tujuan pokok dari DP3AP2KB yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA), pengendalian penduduk dan

pada tanggal 27 Januari 2025.

keluarga berencana (Dalduk KB). DP3AP2KB memiliki tugas pokok, visi dan misi:

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB).

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang PPPA dan Dalduk KB
- 4) Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang PPPA dan Dalduk KB
- 5) Pembinaan umum dan teknis di bidang PPPA dan Dalduk KB
- 6) Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi di bidang PPPA dan Dalduk KB
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang PPPA dan Dalduk KB

c. Visi:

Terwujudnya kabupaten yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tentram, dan sejahtera.

d. Misi:

- 1) Misi Pertama: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama;
- 2) Misi Kedua: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu;
- 3) Misi Ketiga: Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Misi Keempat: Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengalaman ajaran keagamaan dan nilai nilai budaya luhur.

2.3.4 Program Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang

a) Misi Program Pembangunan:

- 1) **Misi Pertama:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* didukung pengembangan kerjasama.
 - 2) **Misi Kedua:** Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
 - 3) **Misi Ketiga:** Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b) Program Pembangunan Daerah khususnya DP3AP2KB Kabupaten Batang terdiri dari 2 urusan:
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 - 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak;
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan;
 - 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.
 2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 1) Program Keluarga Berencana;
 - 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - 3) Program Pelayanan Kontrasepsi;
 - 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
 - 5) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - 6) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
 - 7) Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU.

Pusat pelayanan terhadap perempuan dan anak tercantum dalam SK Bupati No. 411/64/2017 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sebagai Pusat pelayanan terhadap perempuan dan anak. Tim P2TP2A bekerja meliputi pengaduan, tinjauan lokasi, pengayoman dan melakukan pendampingan kepada korban akan informasi dan pendampingan hukum, juga psikologis terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT), pelecehan fisik maupun seksual yang dialami oleh korban perempuan dan anak.

2.3.5 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Batang

Tabel 2.1

Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Batang

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Suptiyono, M.Si.	Kepala Dinas
2.	Masruriah	Sekretaris
3.	Siswo Pramono, SE.	Kepala Subbagian Program
4.	Weni Ary Susanti, SE., MM.	Kepala Subbagian Keuangan
5.	-	Kepala Subbagian Umum
6.	Agus Dwi Priyanto, S. Kep.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
7.	Eko Suharyanto, SKM.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk
8.	Endang Purwanti, SKM.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan
9.	-	Kepala Bidang Keluarga Berencana
10.	Himawan Purwo Handuto, S.K.M., M.H.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana
11.	Mutmainah, SKM., MPH.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Keluarga Berencana
12.	Ir. Sutoyo, M.M	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
13.	Farikhun Asror, SKM., M.Kes.	Kepala Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga
14.	Dr. Sri Retno Nendra T., SE.	Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
15.	Dr. Utariyah Budiastuti	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.	Barokah	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

17.	Urip Haryanto, S.Kep.	Kepala Seksi Perlindungan Anak
-----	-----------------------	--------------------------------

Sumber: Website DP3AP2KB Kabupaten Batang

2.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Batang

Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, merumuskan bahan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan perencanaan dan program kerja pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan seksi pemberdayaan perempuan;
- 4) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan seksi perlindungan anak;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tabel 2.1 Contoh Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Sudah ditangani

No.	Pelaku	Jumlah Korban	Usia Korban	Tempat Kejadian	Tahun Kejadian	Status Kasus
1.	Guru Agama SMP N 1 Gringsing	45 (10 disetubuhi, 35 dicabuli)	Siswi SMP	Lingkungan Sekolah	2023	Sudah ditangani dengan hukuman penjara seumur hidup
2.	Pelatih Rebana	22 Anak laki- laki	5-13 Tahun	Rumah indekos, tempat latihan	2023	Sudah ditangani dengan hukuman penjara 15 tahun
3.	Pengasuh Ponpes	22 santriwati	Remaja, mayoritas di bawah umur	Lingkungan Pesantren	2019- 2023	Sudah ditangani dengan hukuman penjara seumur hidup

Sumber: Dikelola Peneliti 2025